

Kepercayaan Politik dan Intensi Memilih: Perilaku Politik Pemilih Remaja Akhir di Surabaya Menjelang Pemilu 2019

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2020, Vol. 10, No. 1: 23-37
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
© The Author(s) 2020

Ferdinal Mensana

Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia

Ersa Lanang Sanjaya*

Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia

Abstrak

Menjelang Pemilihan Umum 2019 yang berlangsung pada 17 April 2019, partai-partai politik berlomba-lomba untuk mendapatkan hati masyarakat, khususnya pemilih berusia remaja akhir (18-21 tahun) dengan berbagai cara. Artikel ini mengkaji hubungan antara kepercayaan politik dan intensi memilih pemilih berusia remaja akhir. Dengan fokus analisis pada remaja di sebuah universitas di Surabaya, artikel ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Subjek penelitian adalah mahasiswa aktif di universitas tersebut sebanyak 214 orang. Dengan menggunakan *accidental sampling* sebagai metode *sampling*, data dikumpulkan dengan kuesioner kepercayaan dan kuesioner intensi. Menggunakan uji korelasi Spearman's rho dalam analisis datanya, kajian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kepercayaan politik dan intensi memilih pemilih berusia remaja akhir dalam Pemilu 2019 sebagaimana diperlihatkan dalam kasus mahasiswa di universitas di Surabaya.

Kata-kata Kunci

Pemilu, kepercayaan politik, intensi memilih, remaja akhir

Abstract

By the 2019 General Election, which took place in 17 April 2019, political parties competed each other to attract voters, especially from late adolescents (aged 18-21). This article analyses the relationship between political trust and intention to vote among the late adolescent voters. Focusing its analysis on students at a university in Surabaya, this article uses a quantitative method with

* Penulis untuk korespondensi:

Ersa Lanang Sanjaya

Fakultas Psikologi, Universitas Ciputra Surabaya

Email: ersa.sanjaya@ciputra.ac.id

correlational research design. The subject of this study was 214 active students. Using accidental sampling as the sampling method, data were collected through questionnaire and analysed through Spearman's rho correlation test. The results of this study show that political trust had a positive correlation with voting intention among the late adolescents as seen in the case of university students in Surabaya.

Key Words

General election, voting intention, political trust, late adolescents

Pendahuluan

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mencatat bahwa dari 26 pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dari 2005 sampai 2008, 13 pemilihan gubernur dimenangi oleh mereka yang tidak ikut memilih, yang biasa 'golongan putih' (golput). Hal yang mengejutkan adalah suara untuk pemilihan gubernur yang menang lebih sedikit dari jumlah golput. Hal ini juga terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang di mana jumlah suara yang tidak memilih adalah 2,25 juta atau 39,2% dari total suara pemilih, sedangkan suara yang didapatkan oleh Fuazi Bowo sebagai pemenang sebanyak sekitar 2 juta yang setara dengan 35,1% dari total suara pemilih (Subanda 2009).

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2004 menunjukkan angka yang cukup besar pada suara golput ini, yaitu mencapai 65% suara. Saiful Mujani, Direktur LSI, memperkirakan besarnya angka ini di Ibu kota dikarenakan masyarakat meragukan proses demokrasi yang pertama kali diadakan di Ibu Kota Jakarta. Hal ini juga terjadi pada Pilkada di daerah-daerah lain. Misalnya, di Jawa Barat pasangan pemenang Ahmad Hermawan-Dede Yusuf pada Pilkada ini hanya mendapatkan suara sejumlah 7.287.647 suara, sementara jumlah suara golput lebih banyak, yaitu 9.130.594 suara. Di Jawa tengah, pasangan pemenang Bibit Waluyo-Rustriningsih hanya mengantongi suara 6.084.261 suara, sementara angka golput lebih besar, yaitu 11.854.192 suara (Subanda 2009). Juga di Jawa Timur, pada Pilkada yang diadakan 23 Juli 2019, suara golput pada Pemilihan Gubernur mencapai 38.37% suara yang setara dengan 11.152.406 juta penduduk. KPU (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Jawa Timur mencatat jumlah suara sah dalam Pemilihan Gubernur adalah 17.014.266 juta dan suara tidak sah sebanyak 895.045 suara dari total pemilih sebanyak 29.061.718 juta penduduk (Subanda 2009).

Demikian juga pada Pemilihan Kepala Daerah tingkat kabupaten dan kota. Menurut catatan JPPR, dari 130 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pemilu, 39 di antaranya menempati angka golput yang tinggi. Jeirry Sumampow, Koordinator Nasional JPPR, berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh ketidakpercayaan yang berujung pada rendahnya partisipasi masyarakat sehingga menjadikan para pemimpin daerah yang terpilih kurang legitimasi di mata masyarakatnya sendiri. Besarnya angka golput ini juga akan mempengaruhi dan

memiliki hubungan ke depannya pada Pemilu Anggora DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden (Subanda 2009).

Hal ini terbukti pada pergelaran pesta demokrasi tahun 2014 terjadi penurunan partisipasi pemilih dibanding Pemilu 2009. Berdasarkan data KPU, partisipasi pemilu pada Pilpres 2014 sebesar 69,58 persen, sementara pada Pilpres 2009 sebesar 71,17 persen. Dengan demikian, angka golput dari tahun dari Pemilu 2009 ke Pemilu 2014 meningkat sebesar 30,42 persen.

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan UUD 1945 dengan tidak memilih pada pemilihan umum dan pemilihan daerah. Perilaku tidak memilih terjadi karena adanya kepercayaan politik yang rendah yang mengakibatkan tidak adanya intensi untuk memilih. Hal ini mewujud dalam perilaku tidak menghadiri pemilihan umum atau berada pada di bilik suara. Di beberapa negara berkembang seperti di Brazil, ini terwujud dalam ketidakhadiran peserta dalam pemilihan, perusakan kartu suara atau tidak memilih. Biasanya perilaku seperti ini dipandang sebagai gambaran bentuk protes dari masyarakat kepada pemimpin atau partai politik yang sedang berkuasa atau lembaga yang berwenang (Power & Roberts 1995).

Hal ini juga terjadi pada negara-negara maju seperti Australia, Italia, dan Belgia yang menggunakan sistem yang sama seperti Brazil, yaitu sistem wajib memilih di mana jika rakyat tidak memilih, pemerintah akan mengenakan sanksi atau denda pada pelaku yang tidak hadir dalam pemilihan. Pada kenyataannya, tidak semua peserta memilih menyukai kandidat yang sedang bertarung pada pemilihan yang akibatnya membuat mereka mendatangi tempat pemilihan hanya untuk menghindari sanksi atau denda, tapi mereka tidak memilih atau merusak alat-alat suara. Dalam konteks ini, ketidakhadiran dalam pemilihan dipengaruhi oleh faktor institusional (Power & Roberts 1995).

Di Indonesia, ada alasan lain mengapa peserta tidak hadir dalam pemilihan, yaitu karena peserta tidak terdaftar dan tidak memiliki hak suara. Ini terjadi khususnya pada pemilu tahun 2009 yang disebabkan buruknya kinerja dari penyelenggara pemilu. Dengan demikian, ketidakhadiran dalam pemilu bukan dari diri sendiri melainkan karena alasan administratif (Yanuarti 2016).

Lebih jauh, perilaku tidak hadir dalam pemilihan ini dipengaruhi oleh perilaku elit politik yang berorientasi kepada kepentingan pribadi dan kelompoknya seperti pada Pemilu 1999 (Koirudin 2004) sehingga membuat masyarakat Indonesia menjadi trauma yang mendalam. Perubahan sistem Pemilu dari yang sebelumnya sistem pemilihan tertutup pada Pemilu 1999 berubah menjadi sistem terbuka pada Pemilu 2004 membuat masyarakat dapat melihat siapa-siapa saja yang akan dipilih, partai apa saja yang bertarung dan lain-lain. Namun, angka masyarakat yang mengikuti Pemilu 2004 menurun karena mereka memiliki pandangan yang negatif pada partai politik. Banyak orang menganggap bahwa Pemilu hanya sebagai pemenuh kebutuhan pribadi belaka, sementara aspirasi masyarakat tidak tersalurkan melalui wakil-wakilnya yang berada pada pemilu (Bawono 2008). Di samping itu, masyarakat selaku pemilih tidak lagi memilih berdasarkan pola panutan atau tradisional -menjadikan sebuah sosok atau tokoh sebagai panutannya-

melainkan berdasarkan alasan rasional walaupun masih banyak masyarakat yang mendukung partai politik secara fanatik. Hal ini merupakan sebuah pergeseran yang baik. dari sebelumnya menganggap pemilu sebuah kewajiban menjadi menganggap memilih sebagai sebuah hak (Bawono 2008).

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada penelitiannya menemukan bahwa pemilih secara umum kecewa terhadap semua partai politik. Peneliti CSIS bidang Departemen Politik dan Hubungan Internasional, Sunny Tanuwidjaja, mengatakan: “[Masyarakat] bahkan cenderung bingung dan menilai kinerja partai politik tidak berpengaruh pada masyarakat.” Sunny memprediksi munculnya persaingan partai politik pada pemilu 2014 yang lebih ketat dan akan terjadi peningkatan yang tajam pada jumlah golongan putih (golput) (Zulkarnain 2012).

Peningkatan jumlah yang tidak memilih merupakan konfirmasi sekaligus implikasi dari rendahnya kepercayaan publik terhadap calon-calon pemimpin dan partai politik mereka. Ini dibuktikan dengan penurunan dukungan yang terbesar yang dialami oleh Partai Demokrat sebanyak 8,25 persen. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dukungan berkurang sebanyak 6,23 persen, Golkar turun 3,95 persen dan Partai Keadilan Sosial turun 4,78 persen. Penurunan yang paling rendah dialami oleh Partai Kebangkitan Nasional yang hanya 0,54 persen. Walaupun demikian, Partai Demokrat tetap menjadi partai yang relatif kuat daripada partai-partai lainnya dengan dukungan 12,6 persen pemilih, kemudian diikuti Golkar 10,5 persen, dan PDIP 7,8 persen (Zulkarnain 2012).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa perubahan sistem Pemilu tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Walaupun masih memiliki kepercayaan kepada pemerintah, mereka yang memiliki kepercayaan yang rendah bahkan yang tidak percaya sama sekali kepada partai politik tidak mau untuk memilih, terlibat dalam kampanye dan urusan publik lainnya (Citrin 1974). Rosenstone dan Hansen (1993) mengatakan bahwa kepercayaan merupakan faktor yang tidak signifikan dalam partisipasi pemilihan.

Hal di atas memunculkan pertanyaan: apakah tidak adanya hubungan antara kepercayaan politik dan tingkat partisipasi memilih berlaku bagi semua kelompok pemilih? Bagaimana dengan kelompok pemilih remaja akhir?

Masalah kelompok remaja akhir ini perlu diangkat mengingat jumlah mereka yang sangat signifikan. Pada pemilihan umum, suara pemilih remaja akhir ini diperebutkan oleh para calon yang bertarung membutuhkan suara pemilih. Ini disebabkan karena jumlah pemilih remaja akhir di Indonesia yang memiliki hak suara cukup besar secara kuantitatif dan sangat signifikan untuk kemenangan masing-masing calon yang bertarung. Pemilih remaja akhir memiliki potensi yang cukup besar sebanyak kurang-lebih 7 juta suara. Selain itu juga, kurang-lebih ada lima juta calon pemilih yang akan berumur 17 tahun dalam jangka waktu Januari sampai April 2019 (Fachrudin 2018).

Karena itu, persoalan kepercayaan politik dan partisipasi dalam Pemilu di kalangan remaja akhir ini menarik dan layak untuk dikaji. Untuk tujuan itu, artikel ini mengkaji hubungan kepercayaan politik dan intensi memilih di kalangan

remaja akhir dengan fokus analisis pada remaja akhir di Surabaya menjelang Pemilu Presiden 2019. Artikel ini berargumen bahwa kepercayaan politik terhadap calon presiden memiliki hubungan positif dengan intensi memilih pada pemilih sebagaimana terlihat pada pemilih remaja akhir di Surabaya.

Untuk menjawab pertanyaan apakah ada hubungan antara kepercayaan politik dan intensi memilih di kalangan remaja akhir, kajian ini menggunakan teori Fishbein dan Ajzen (2010) tentang intensi sebagai kerangka teoritiknya. Menurut mereka, intensi adalah suatu pandangan subjektif seseorang yang memungkinkan untuk menciptakan perilaku yang diyakini oleh individu itu sendiri. Intensi terdiri dari beberapa elemen yaitu *target*, *action*, *context* dan *time*. Selain itu, kajian ini menggunakan juga konsep kepercayaan politik sebagai variabel prediktor. Menurut Kremer dan Tylor (1995), kepercayaan merupakan konsep organisasi yang kompleks dan merupakan hubungan interpersonal. Kepercayaan politik memiliki dimensi sebagai berikut: kemampuan (Zand 1972), kebajikan (Frost *et al.* 1978), dan integritas (McFall 1987).

Berdasarkan teori di atas, intensi memilih dalam pemilu ditentukan oleh pandangan subjektif dari pemilih yang menimbulkan sikap pemilih yang negatif atau positif. Dilihat dari definisi intensi menurut Fishbein dan Ajzen (2010), intensi adalah suatu pandangan subjektif seseorang yang merupakan awal mula terbentuknya perilaku. Intensi bukanlah sebuah perilaku, melainkan masih berada dalam tataran kognitif, tetapi intensi merupakan prediktor utama untuk terbentuknya perilaku (Warneryd 1999). Intensi ini akan tetap ada pada diri seseorang yang tersimpan yang nantinya akan keluar menjadi suatu perilaku ketika kesempatan dan waktu yang tepat yang dirasakan oleh individu itu sendiri.

Menurut Ajzen (2005), intensi yang muncul ini dapat dipengaruhi oleh tiga determinan, yaitu sikap, norma, dan *perceived behavior control*. Sikap adalah evaluasi yang didapatkan oleh individu dalam wujud evaluasi positif atau negatif terhadap perilaku yang akan muncul. Norma merupakan persepsi seseorang terhadap tekanan sosial untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan perilakunya. Persepsi yang dimaksud adalah opini dari lingkungan sekitar yang dianggap berhubungan dan berarti oleh individu dalam memunculkan perilakunya. Sedangkan *perceived behavioral control* adalah kesulitan dan halangan yang diyakini oleh individu yang berasal dari pengalaman masa lalu.

Intensi terdiri dari beberapa elemen pembentuk yaitu *target*, *action*, *context* dan *time*. *Target* merupakan suatu hal yang akan dituju oleh sesuatu. *Action* adalah suatu perilaku untuk mencapai tujuan oleh individu. *Context* adalah menunjukkan lokasi atau situasi dimana perilaku itu dimunculkan. *Time* menunjukkan kapan individu menginginkan perilaku itu muncul. Semua ini adalah aspek-aspek yang menyatu menjadi sebuah intensi dan menjadi sebuah perilaku, tergantung seberapa besar kontribusi dari masing-masing elemen tersebut (Fishbein & Ajzen 2010).

Dalam hal sikap merupakan salah satu faktor pembentuk intensi (intensi memilih dalam pemilu), pada konteks kajian ini sikap bisa diterjemahkan sebagai kepercayaan calon pemilih terhadap calon presiden pada Pemilu 2019. Kepercayaan itu sendiri bisa diturunkan menjadi tiga dimensi: pertama,

kemampuan yang terkait dengan keterampilan, kompetensi, dan karakteristik yang dimiliki oleh calon presiden/wapres (Zand 1972); kedua, kebajikan yang menyangkut sejauh mana individu mempercayai calon presiden/wapres memiliki kebaikan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi (Frost *et al* 1978); dan ketiga, integritas yang terkait dengan apakah calon presiden/wapres bisa mengikuti norma-norma yang sudah ada, termasuk undang-undang (McFall 1987). Nawawi (2012) mengungkapkan bahwa kepercayaan merupakan syarat mutlak dan wajib ada dalam ranah sosial dan politik. Selain itu kepercayaan adalah syarat penting dalam keberlangsungan politik agar mencapai visi dan misi yang diharapkan dan sesuai dengan bentuk pemerintahan yang demokratis.

Metode Penelitian

Untuk menjawab masalah penelitian di atas, kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah intensi memilih dan variabel bebas dari penelitian ini adalah kepercayaan politik. Sampel dalam penelitian ini adalah remaja akhir yang berusia 18-21 tahun dengan jumlah subjek 214 orang. Selain itu, subjek dalam penelitian ini berstatus sebagai mahasiswa yang sedang berkuliah pada Universitas X di Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan memberikan kuisioner kepada siapapun yang ditemui dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Pengumpulan data menggunakan dua macam skala yang masing-masing mengukur satu variabel dengan skala skor (Skala Likert). Kedua skala memiliki rentang skor 1-6 di mana pilihan responnya adalah “sangat tidak setuju”, “tidak setuju”, “agak tidak setuju”, “agak setuju”, “setuju”, dan “sangat setuju”. Untuk item *favorable*, pilihan “sangat tidak setuju” diterjemahkan dengan skor 1 sedangkan pilihan “sangat setuju” diterjemahkan dengan skor 6. Untuk item *unfavorable*, skoring akan dibalik di mana “sangat setuju” akan memiliki skor 1 sedangkan “sangat tidak setuju” memiliki skor 6.

Kuisioner penelitian berbentuk kuisioner online mengingat subjek dalam penelitian ini adalah remaja akhir yang lebih menyukai hal yang bersifat digital. Pengisian kuisioner memerlukan waktu sekitar 5-10 menit sehingga diharapkan dengan durasi pengisian yang relatif pendek, subjek penelitian bisa mengisi kuisioner dengan sungguh-sungguh. Penyebaran kuisioner dilakukan dengan penyebaran link online melalui grup-grup media sosial yang dimiliki oleh peneliti. Kuisioner mulai disebar pada tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019 di mana tanggal itu merupakan beberapa bulan sebelum pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Dengan demikian, variabel intensi memilih dikontekskan dalam setting pemilihan presiden dan relevan kondisi saat itu, yaitu Pemilihan Umum Presiden.

Dalam penelitian ini, kami memodifikasi skala kepercayaan organisasi dari Mayer & Davis (1999) menjadi setting politik dengan menyusun dari 34 item dengan 17 item *favorable* dan 17 item *unfavorable*. Semua item ini terbagi dalam tiga dimensi: pertama, dimensi kemampuan atau kompetensi dengan contoh

item *favorable* “Saya merasa sangat yakin dengan keahlian Calon Presiden/Wapres”, dan contoh item *unfavorable* “Saya merasa Calon Presiden/Wapres, kurang memenuhi kualifikasi saya; kedua, dimensi kebajikan dengan contoh item *favorable* “Saya merasa Calon Presiden/Wapres sangat peduli dengan kesejahteraan rakyat” dan contoh item *unfavorable* “Saya merasa kesejahteraan masyarakat kurang dipedulikan oleh Calon Presiden/Wapres”; dan ketiga, dimensi integritas dengan contoh item *favorable* “Saya merasa Calon Presiden/Wapres memiliki rasa keadilan yang kuat” dan contoh item *unfavorable* “Saya merasa Calon Presiden/Wapres kurang memiliki rasa keadilan. Untuk skala intensi, kami menggunakan Skala Ajzen (2005) dengan empat elemen, yaitu *target*, *context*, *action*, dan *time* yang digunakan sebagai panduan untuk menyusun item-item yang digunakan untuk mengukur intensi. Item intensi memilih tersusun dari 10 item yang menunjukkan intensi individu dalam memilih dengan contoh item *favorable* “Saya memiliki niat yang kuat untuk menggunakan hak pilih saya dalam pemilu nanti” dan contoh item *unfavorable* “Saat ini saya berencana untuk tidak menggunakan hak pilih saya dalam pemilu nanti”.

Skala intensi memilih memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0.8 dan dimensi-dimensi dari skala kepercayaan politik, yang terdiri dari kemampuan, kebajikan, integritas, juga memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0.8 . Berdasarkan hal itu, kedua skala dikatakan *reliable*. Selain itu, setiap item dari masing-masing skala menunjukkan angka CITC (Corrected Item Total Correlation) > 0.3 di mana hal ini berarti skala bisa dikatakan valid (Azwar 2013). Pengujian hipotesis menggunakan teknik korelasi *Spearman’s Rho* karena distribusi data ditemukan tidak normal.

Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Kategori Intensi Memilih

Setelah menentukan skor dari norma kategorisasi, kami kemudian mengkategorikan skor total subjek dari skala intensi ke dalam beberapa kategori yang dicantumkan pada tabel berikut ini (Tabel 1).

Tabel 1
Deskripsi Subjek Berdasarkan Intensi Memilih

Kategori	N	Persentase
Sangat Rendah	10	4, 67%
Rendah	15	7, 01%
Sedang	51	23, 83%
Tinggi	80	37, 38%
Sangat Tinggi	58	27, 10%

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian memiliki tingkat intensi dalam memilih yang didominasi oleh kategori tinggi dan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemilih remaja memiliki antusiasme dalam mengikuti pemilihan umum. Namun, cukup banyak juga yang tidak terlalu antusias bahkan tidak antusias untuk terlibat dalam pemilihan umum, di mana ditunjukkan pada kategori sedang, rendah, dan sangat rendah yang jika ditotal mencapai 35.5%.

Hubungan antara Kepercayaan Politik dan Intensi Memilih pada Remaja Akhir

Berdasarkan hasil uji korelasi pada hipotesis penelitian ini, menjelang Pemilu Presiden 2019 ditemukan adanya hubungan positif antara kepercayaan politik dengan intensi memilih pada pemilih remaja yang ditunjukkan dengan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$) dan nilai $r = 0,564$. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan dalam politik, semakin tinggi intensi untuk mengikuti Pemilu 2019. Oleh sebab itu, hipotesis utama diterima. Selain itu, hubungan antara kepercayaan politik dan intensi memilih memiliki kekuatan korelasi yang cukup kuat yaitu 0,564.

Kepercayaan merupakan hal yang wajib dimiliki dalam bersosial dan berpolitik demi berlangsungnya politik yang baik dan sesuai dengan tujuan pemerintah yang demokratis. Kepercayaan juga merupakan pondasi untuk tetap membangun dan menjaga semangat masyarakat kepada pemerintah demi tercapainya politik yang berdaulat, adil, makmur dan demokratis (Nawawi 2012). Menurut Ajzen dan Fishbein (1975), pada dasarnya, kepercayaan memiliki hubungan yang erat dengan intensi. Intensi sendiri merupakan niat seseorang untuk menciptakan sikap tertentu yang ditunjukkan dengan munculnya elemen-elemen dalam intensi berupa *target*, *context*, *action*, dan *time*. Intensi yang muncul merupakan bagian dari kepercayaan yang dimiliki yang akhirnya menciptakan sebuah sikap yang merupakan wujud nyata dari intensi tersebut. Sikap ini merupakan sebuah evaluasi positif atau negatif oleh individu terhadap perilaku yang muncul dari persepsi lingkungan (Ajzen 2005). Selain itu, Ajzen dan Fishbein (1975) menggambarkan intensi dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* dengan tiga aspek penghubung yang salah satunya adalah sikap. Dalam konteks kajian ini, sikap yang dimaksud berupa kepercayaan terhadap politik.

Jika hal ini dikaitkan dengan pemilu, intensi memilih yang ditunjukkan dengan sikap seperti hadir dalam pemilu dan menggunakan hak suaranya merupakan bukti bahwa pemilih remaja akhir memiliki persepsi yang positif terhadap pemerintah yang mana persepsi ini akan menimbulkan sebuah sikap yang membuktikan bahwa pemilih remaja akhir memiliki kepercayaan terhadap politik di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepercayaan politik yang dimiliki pemilih remaja akhir mempengaruhi tingkat intensi yang muncul pada Pemilu 2019.

Hal ini juga didukung dengan adanya penelitian sebelumnya oleh Layton (2010) yang mengutip Anderson (2005) di mana ia mengatakan bahwa kepercayaan merupakan poin penting dalam proses pemilihan dan menjadi bagian yang integral

untuk mendapatkan hasil pemilihan yang sah. Hasil korelasi ini juga didukung dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang demokrasi. Kebebasan masyarakat dalam menentukan kepercayaan kepada pemerintah adalah bukti suatu negara yang demokrasi. Semakin suatu negara dapat memberikan kebebasan berdemokrasi kepada masyarakatnya, akan semakin besar rasa kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah (Layton 2010). Miller *et al.* (1979) memberikan bukti bahwa kepercayaan memiliki pengaruh terhadap intensi yang menciptakan suatu sikap berupa partisipasi dalam politik. Hetherington (1999) juga mengatakan bahwa kepercayaan politik memiliki hasil yang signifikan secara efek positif apabila hanya terdapat dua calon yang mengikuti pemilihan.

Hubungan antara Intensi Memilih dan Dimensi-dimensi Kepercayaan Politik

Setelah melakukan uji hipotesis, kami melakukan uji tambahan dengan mengkorelasikan antara variabel terikat dengan masing-masing dimensi yang dimiliki oleh variabel bebas. Hasil dari uji tambahan ini cantumkan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Hasil Uji Tambahan

Kepercayaan Politik	Hasil Uji Statistik	Keterangan
Kemampuan/Kompetensi	$r = 0,522$; $p = 0,000$	Berkorelasi
Kebajikan	$r = 0,486$; $p = 0,000$	Berkorelasi
Integritas	$r = 0,521$; $p = 0,000$	Berkorelasi

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa menjelang Pemilu Presiden 2019 dimensi-dimensi kepercayaan politik secara signifikan berkorelasi dengan intensi memilih. Dari ketiga dimensi, ternyata dimensi kemampuan memiliki kekuatan korelasi yang paling kuat, sedangkan kebajikan memiliki kekuatan korelasi yang paling lemah. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih remaja menganggap persepsi terhadap kemampuan dari calon merupakan hal yang paling penting sebagai pertimbangan untuk memilih dibandingkan dua dimensi lainnya.

Hubungan antara Dimensi Kemampuan Calon Presiden dan Intensi Memilih Remaja Akhir

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa menjelang Pemilu Presiden 2019 terdapat hubungan yang positif dan cukup tinggi antara intensi memilih remaja akhir dengan dimensi kemampuan calon presiden dengan $r = 0,564$ dan Signifikansi = $0,000$. Ini berarti bahwa kemampuan atau kompetensi dapat mempengaruhi

intensi masyarakat khususnya pemilih remaja akhir dalam pemilu. Hal ini sesuai dengan penelitian Popkin (1991 dalam Pfau *et al.* 1993) yang mengatakan bahwa kompetensi atau kemampuan sangat diperhatikan oleh para pemilih dalam pemilu dengan alasan kompetensi atau kemampuan ini adalah sebuah ukuran kemampuan untuk menjalankan pekerjaan, menilai seberapa baik kinerja calon ketika terpilih, atau tentang bagaimana calon menyelesaikan suatu masalah.

Menurut Lembaga Survei Nasional, mayoritas pemilih remaja akhir dengan jumlah tertinggi 46,4 persen memilih berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki calon dalam memecahkan masalah (Azmi & Astuti 2016). Sebuah survei menunjukkan bahwa 58% responden menganggap kemampuan atau kompetensi ini merupakan indikator yang paling kuat untuk mereka mau menggunakan hak pilihannya (Pfau *et al.* 1993). Dengan demikian, jika pemilih remaja akhir melihat bahwa kemampuan calon semakin baik, maka pemilih remaja akhir akan semakin percaya dengan menunjukkan intensi memilih mereka dengan sikap positif berupa perilaku memilih.

Hubungan antara Dimensi Kebajikan Calon Presiden dan Intensi Memilih Remaja Akhir

Hasil korelasi dimensi kebajikan (*benevolence*) calon presiden dengan intensi memilih remaja akhir adalah $r = 0,522$ dan Signifikansi = 0,000. Ini berarti kebajikan yang dimiliki oleh calon presiden mempengaruhi intensi memilih remaja akhir. Dalam penelitian mereka, Corazzini *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa masyarakat memilih dan memberikan suara mereka untuk calon yang menurut mereka memiliki kebajikan yang tinggi. Suara yang diberikan oleh masyarakat dalam pemilihan merupakan cerminan harapan mereka tentang kebajikan yang dimiliki oleh calon yang mereka pilih. Pada sembilan dari sepuluh pemilihan umum, pemilih remaja akhir memilih para calon berdasarkan kebajikan yang dimiliki oleh para calon dan ini merupakan harapan masyarakat tentang kebajikan calon dalam pemilu.

Kebajikan merupakan sifat yang lebih mengutamakan kepentingan bersama dan kepentingan masyarakat umum daripada kepentingan individu (Frost *et al.* 1978). Selain itu, kebajikan dilihat pula dari seberapa banyak yang sudah calon berikan demi kepentingan umum melalui program kerja yang sudah dijabarkan oleh mereka dalam pemilu. Jones *et al.* (1975) mengatakan bahwa janji yang dibuat demi kepentingan bersama merupakan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga hal ini dapat mempengaruhi rasa kepercayaan pada calon pemimpin pada pemilu, yang mana kepercayaan ini merupakan sikap yang berhubungan positif dengan intensi memilih. Dengan demikian, kebajikan yang dimiliki oleh seorang calon dengan menjawab kebutuhan bersama dan harapan masyarakat akan mempengaruhi tingkat kepercayaan mereka. Semakin positif kepercayaan pemilih kepada seorang calon, semakin positif pula intensi pemilih dalam memilih dengan menunjukkan sikap atau perilaku yang memenuhi elemen-elemen dalam pembentukan intensi.

Hubungan antara Dimensi Integritas Calon Presiden dan Intensi Memilih Remaja Akhir

Uji korelasi tambahan yang sudah dilakukan pada dimensi integritas menunjukkan hasil $r = 0,521$ dan signifikansi $= 0,000$. Ini berarti terdapat hubungan yang positif antara dimensi integritas calon presiden dalam Pemilu 2019 dan intensi memilih remaja akhir. Integritas merupakan persepsi yang diberikan pemilih kepada calon pemimpin saat pemilu yang mana calon pemimpin akan menerima prinsip-prinsip yang sudah ada. Persepsi pemilih terhadap calon pemimpin yang dimaksud adalah kejujuran; calon pemimpin yang memiliki integritas adalah mereka yang memiliki kejujuran. Kejujuran yang dimaksud di sini adalah ketulusan hati seorang calon pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk menjalankan wewenang yang telah diberikan dengan baik dan tidak disalahgunakan. Kejujuran merupakan faktor yang dapat menciptakan rasa hormat dan kepercayaan pemilih terhadap calon dan pemerintah sehingga dapat dipercaya (Yulianti & Wuryanti, 2015).

Calon pemimpin yang memiliki integritas atau kejujuran dapat mempengaruhi kepercayaan si pemberi kepercayaan, dalam konteks di sini adalah pemilih remaja akhir. Integritas merupakan suatu sikap yang menentukan seberapa besar percaya pemilih kepada calon pemimpin. Jika seorang calon pemimpin memiliki integritas yang rendah bahkan tidak jujur dan membuat-buat informasi yang tidak sesuai fakta, maka masyarakat memiliki intensi untuk memilih yang rendah atau tidak sama sekali kepadanya.

Kesimpulan

Artikel ini telah menunjukkan bahwa intensi untuk memilih dari pemilih remaja akhir pada pemilihan umum, khususnya pada Pemilu 2019, dipengaruhi oleh kepercayaan mereka terhadap calon-calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi. Tiga dimensi kepercayaan politik, yakni kemampuan, kebajikan dan integritas calon, mempengaruhi intensi memilih subjek penelitian dengan dimensi kemampuan calon menempati urutan tertinggi. Kepercayaan terhadap para calon pemimpin merupakan hal penting bagi pemilih yang berada dalam usia remaja akhir atau pemilih pemula.

Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah dari dimensi-dimensi kepercayaan, ternyata dimensi kemampuan atau kompetensi dari calon merupakan unsur yang paling penting sebagai pertimbangan memilih terutama bagi pemilih pemula yang kebanyakan berada dalam usia remaja akhir atau dewasa awal. Akses masyarakat untuk mengetahui kinerja, kemampuan, dan kompetensi dari calon, dalam konteks penelitian ini adalah calon presiden dan wakil presiden, terbuka secara luas mengingat kemajuan teknologi yang sudah sangat pesat dan berdampak terhadap mudahnya penyebaran informasi.

Selain terkait dengan kemampuan atau kompetensi dari calon, integritas dari calon juga merupakan faktor yang memiliki hubungan cukup kuat. Integritas berkaitan dengan kejujuran dari calon, di mana dalam hal ini pemilih akan melihat apakah calon akan menjalankan wewenang yang diberikan oleh rakyat dengan

baik atau tidak. Hal ini mejadikan *track record* dari calon menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, kebajikan, walaupun memiliki kekuatan hubungan yang paling rendah dibandingkan dengan dimensi lainnya, bisa dikatakan memiliki kekuatan hubungan yang cukup kuat. Kebajikan dalam hal ini adalah penilaian pemilih terkait dengan apakah calon memikirkan kepentingan rakyat atau tidak.

Temuan ini penting dalam hal bisa menjadi referensi bagi para pelaku politik untuk terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga mereka dan calon-calon presiden, wakil presiden dan pemimpin lainnya yang mereka usung. Jika ingin memiliki citra yang baik di mata pemilih yang berada dalam rentang usia remaja atau masih bisa dikatakan pemilih pemula, maka mereka semestinya memperhatikan tiga hal, yaitu kemampuan, kebajikan dan integritas calon-calon pemimpin yang mereka ajukan.

Harus diakui bahwa kajian ini memiliki kekurangan dalam hal subjek penelitian tidak merepresentasikan keseluruhan pemilih pemula dan distribusi data yang tidak merata sehingga generalisasi penelitian tidak bisa dilakukan. Karena itu, perlu penelitian lanjutan dengan lingkup subjek yang lebih luas dan waktu yang memadai sehingga hasil dari penelitian tersebut lebih bisa diaplikasikan dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, perlu juga mengkaji variabel-variabel lain seperti konteks pemilu atau politik, norma dan kontrol sebagai pembentuk intensi untuk memilih.

Referensi

- Ajzen, Icek. 2005. *Attitudes, Personality and Behaviour*. New York: McGraw-Hill Education.
- Ajzen, Icek dan Martin Fishbein. 1975. *Belief, Attitude, Intentions and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. California: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Azmi, Khairul, Puji Astuti, dan Fitriyah. 2014. "Perilaku Memilih Pemilih Remaja Akhir Masyarakat Kendal pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014". *Journal of Politic and Government Studies* 5(03): 362-370.
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bestiana, Desi. 2012. "Citra Tubuh dan Konsep Tubuh Ideal Mahasiswi FISIP Universitas Airlangga Surabaya". Disertasi. Universitas Airlangga.
- Citrin, Jack dan Donald Philip Green. 1986. "Presidential Leadership and the Resurgence of Trust in Government". *British Journal of Political Science* 16(October):431-53.
- Corazzini, Luca, Sebastian Kube, Michel Andre Maréchal, dan Antonio Nicolo. 2014. "Elections and Deceptions: An Experimental Study on the Behavioral Effects of Democracy". *American Journal of Political Science* 58(3):579-592.
- Djaali dan Puji Muljono. 2007. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.

- Dwi, Damar Asih. 2012. "Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Return On Asset (ROA) Perbankan". *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 1(1).
- Eriyanto. 2007. *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKiS
- Fachrudin, Ahmad. 2018. "Menyelamatkan Pemilih Pemula". Diunduh 3 Oktober 2018 (<https://news.detik.com/kolom/d-4240110/menyelamatkan-pemilih-pemula>).
- Fenyapwain, Marissa Marlein. 2013. "Pengaruh Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Remaja Akhir di Desa Tounelet Kecamatan Kakas". *Jurnal Acta Diurna* 2(1).
- Fishbein, Martin dan Icek Ajzen. 2010. *Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach*. New York: Psychology Press.
- Fukuyama, Francis. 1995. *The Social Witness and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Hetherington, Marc J. 1999. "The Effect of Political Trust on the Presidential Vote, 1968–96". *American Political Science Review* 93(2):311-326.
- Hubbard, Raymond. 1978. "The Probable Consequences of Violating the Normality Assumption in Parametric Statistical Analysis". *Area* 10:393-398.
- "Kepercayaan pada Partai Politik". Diunduh 16 Oktober 2018 (<https://nasional.tempo.co/read/383611/csis-kepercayaan-pada-partai-politik-menurun/full&view=ok>).
- Kramer, R. M., dan T. R. Taylor. 1995. *Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research*, Thousand Oaks, Calif: Sage.
- Kurniawan, Gadug. 2015. "Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi". *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 8(1).
- Koirudin. 2004. *Profil Pemilu 2004: Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Layton, Matt L. 2010. "Trust in Elections". *Americasbarometer Insights Series* 37.
- Listianti, I. K. 2010. "Trait Kepribadian dan Psychological Distress pada Mahasiswa Universitas Indonesia Berdasarkan Rumpun Ilmu". Skripsi. Universitas Indonesia.
- Lumley, Thomas, Paula Diehr, Scott Emerson, dan Lu Chen. 2002. "The Importance of the Normality Assumption in Large Public Health Data Sets". *Annual Review of Public Health* 23(1):151-169.
- Mayer, R. C., J. H. Davis, dan F. D. Schoorman. 1995. "An Integrative Model of Organizational Trust". *Academy of Management Review* 20(3):709-734.
- McEvily, Bill dan Marco Tortoriello. 2011. "Measuring Trust in Organisational Research: Review and Recommendations". *Journal of Trust Research*, 1(1), 23-63.

- Merrel, Kenneth W. dan Sara A. Whitcomb. 2013. *Behavioral, Social, and Emotional Assessment of Children and Adolescents*. Fourth Edition. New York: Routledge.
- Miller, Arthur H., Edie Goldenberg dan Lutz Erbring. 1979. "Typeset Politics: Impact of Newspapers on Public Confidence." *American Political Science Review* 73(March):67-84.
- Nawawi, Juanda. 2012. "Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1(3):19-29.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Penerbit Salemba Medika.
- Ocampo, Jose Antonio. 2006. "Congratulatory Message". Hal. 3 dalam *The Regional Forum of Reinventing Government in Asia*. Seoul: Ministry of Government.
- Öztuna, Derya, Atilla Halil Elhan, dan Ersoz Tüccar. 2006. "Investigation of Four Different Normality Tests in Terms of Type 1 Error Rate and Power Under Different Distributions". *Turkish Journal of Medical Sciences* 36(3):171-176.
- Pfau, M., T. Diedrich, K. M. Larson, dan K.M. van Winkle. 1993. "Relational and Competence Perceptions of Presidential Candidates During Primary Election Campaigns". *Journal of Broadcasting & Electronic Media* 37(3): 275-292.
- Power, T. J., J. T Roberts. 1995. "Compulsory Voting, Invalid Ballots, and Abstention in Brazil". *Political Research Quarterly* 48(4):795-826.
- Rahmatunnisa, Mudiayati. 2017. "Mengapa Integritas Pemilu Penting?" *Jurnal BAWASLU* 3(1): 1-11.
- Rosenstone., Steven J. dan John Mark Hansen. 1993. *Mobilization, Participation, and Democracy in America*. New York: Macmillan.
- Schatschneider, C., dan C. J. Lonigan. 2010. "Misunderstood Statistical Assumptions Undermine Criticism of the National Early Literacy Panel's Report". *Educational Researcher* 39(4):347-351.
- Shintaviana, Fransisca Vivi dan G. Arum Yudarwati. 2014. "Konsep Diri Serta Faktor-faktor Pembentuk Konsep Diri Berdasarkan Teori Interaksionisme Simbolik". Diunduh 30 Juni 2016 (<http://e-journal.uajy.ac.id/5781/1/jurnal.pdf>).
- Subanda, Nyoman. 2009. "Analisis Kritis Terhadap Fenomena Golput dalam Pemilu". *Jurnal Konstitusi* 2(1).
- Warneryd, Karl Erik. 1999. *The Psychology of Saving: A Study on Economic Psychology*. Stockholm: Edward Elgar Publishing.
- Yanuarti, Sri. 2016. "Golput dan Pemilu di Indonesia". *Jurnal Penelitian Politik* 6(1): 21-32.

Yulianti dan Wuryanti. 2015. “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Integritas Perilaku dan Kepercayaan Terhadap Pimpinan dalam Peningkatan Kinerja SDM (Studi BLHKP, BKPPD, dan BPMP Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara). *2nd Conference in Business, Accounting, and Management 2015*. Sultan Agung Islamic University.

